

PENDEKATAN SISTEMIK UNTUK ANALISIS DAN TRANSFORMASI KONFLIK: STUDI KASUS KONFLIK SOSIAL DI DESA BALINURAGA

Susetyo^{1)*}, Ikram²⁾, Anita Damayantie³⁾
^{1,2,3)}Jurusan Sosiologi, Universitas Lampung
*Corresponding e-mail: susetyo.1958@fisip.unila.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengembangkan pemahaman konflik yang lebih dalam dengan menggunakan teori kompleksitas dan transformasi konflik sebagai panduan teoritis, dan juga mengajukan cara hipotetis untuk memulai usaha *peace building* menurut teori transformasi konflik. Jenis penelitian yang akan diterapkan yaitu penelitian kualitatif eksploratif berdasarkan studi kasus ilustratif tunggal. Penelitian ini akan bergantung sepenuhnya pada data sekunder. Pendekatan analisis sistemik terdiri dari dua bagian; salah satunya adalah pemetaan konflik, atau analisis konflik itu sendiri, dan yang kedua menggunakan analisis ini untuk menyusun strategi proses transformasi merupakan lensa dalam penelitian ini. Analisis sistemik, sebuah metode yang menekankan pentingnya hubungan dan efek yang dimiliki masing-masing pihak terhadap semua subsistem yang berbeda. Studi ini telah menunjukkan analisis tentang multiple sistem mengenai konflik di Balinuraga melalui lensa transformasi konflik dan teori kompleksitas. Temuan-temuan menunjukkan bahwa transformasi konflik dapat membawa suatu wilayah, kelompok menjadi maju, menuju demokrasi, pembangunan dan perdamaian. Ini membutuhkan implementasi yang hati-hati dan pemantauan sistematis serta komitmen dari semua pemangku kepentingan yang berkonflik dan bantuan eksternal potensial. Transformasi konflik, termasuk rekonsiliasi, perubahan tata kelola, transformasi sikap dan perilaku serta pembangunan kepercayaan adalah proses untuk mengungkap dalam waktu yang cukup lama, bahkan puluhan tahun dan orang seharusnya tidak mengharapkan hasil segera.

Kata kunci: konflik, pendekatan sistem, analisis dan transformasi konflik

ABSTRACT

This study aims to develop a deeper understanding of conflict by using complexity theory and conflict transformation as a theoretical guide, and also proposes a hypothetical way to start peace building efforts according to conflict transformation theory. The type of research that will be applied is exploratory qualitative research based on a single illustrative case study. This research will rely entirely on secondary data. The systemic analysis approach consists of two parts; one of them is conflict mapping, or conflict analysis itself, and secondly using this analysis to strategize the transformation process is the lens in this research. Systemic analysis, a method that emphasizes the importance of the relationship and the effect that each party has on all the different subsystems. This study has shown an analysis of multiple systems regarding conflict in Balinuraga through the lens of conflict transformation and complexity theory. The findings show that conflict transformation can bring a region, a group forward, towards democracy, development and peace. This requires careful implementation and systematic monitoring and commitment from all conflicting stakeholders and potential external assistance. Conflict transformation, including reconciliation, governance change, attitude and behavior transformation and trust building is a process to uncover that takes quite a long time, even decades and one should not expect immediate results.

Keywords: conflict, systems approach, conflict analysis and transformation

PENDAHULUAN

Berdasarkan realitas sering terjadi konflik kekerasan di banyak daerah di Indonesia, maka DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Kemudian pada tahun 2013 ditindaklanjuti dengan dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Pada tataran implementasi, maka kebijakan penanganan konflik sosial harus didukung dengan upaya membangun perdamaian (*peace building*) atau Bina Damai, terutama dalam merekonstruksi dan memperkuat kembali berbagai aspek kehidupan masyarakat yang rusak pasca konflik.

Kondisi masyarakat yang rentan konflik kekerasan menunjukkan, *pertama*, rendahnya ketahanan sosial. *Kedua*, tidak efektifnya sistem deteksi dini dan respon dini masyarakat terhadap potensi konflik sehingga dengan cepat berkembang menjadi konflik terbuka. *Ketiga*, tidak tuntasnya upaya penyelesaian konflik-konflik sosial yang terjadi. Penyelesaian konflik memiliki alat yang terbatas untuk menangani konflik yang banyak aktor dan kompleksitas hubungan, dan kadang kala tanpa pemimpin untuk mewakili kelompok-kelompok pada berbagai tingkat masyarakat dan terlibat dengan kelompok lain. Oleh karena itu harus diakui bahwa diperlukan pendekatan baru untuk memahami konflik.

Tulisan ini akan melihat konflik yang terjadi di Desa Balinuraga dengan menggunakan teori kompleksitas dan transformasi konflik sebagai alat teoritis untuk memahami konflik itu sendiri, dan menyelidiki kemungkinan jalan menuju perdamaian positif. Penelitian ini akan fokus untuk menjawab pertanyaan berikut ini: “Bagaimana teori kompleksitas dan transformasi konflik dapat menjelaskan kompleksitas konflik di Balinuraga dan potensi-potensi menuju perdamaian positif?”

TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini akan memperkenalkan kerangka teoretis yang akan digunakan untuk menganalisis konflik di Balinuraga. Pertama, menguraikan teori kompleksitas, sebuah pendekatan Sosiologis yang memandang konflik sebagai seperangkat sistem *inter-related* dan *inter-dependent* yang kompleks dan oleh karena itu dapat membantu

memahami lebih jauh konflik etnis. Kedua, kerangka teoritis yang membahas transformasi konflik dan potensinya untuk mendorong perubahan guna mentransformasikan konflik menuju perdamaian.

Kompleksitas Konflik

Menurut Boulding, konflik "beroperasi di tepi kekacauan - tidak sepenuhnya acak tapi tidak dalam ekuilibrium" (Boulding, 1962). Memang, konflik terdiri dari berbagai faktor yang saling mempengaruhi, dan juga tunduk pada sifat manusia yang tidak pasti. "Manusia tidak hanya bergerak dengan tekanan langsung namun dengan tujuan, rentan terhadap perubahan sebagai akibat perubahan informasi terkini" (Boulding, 1962). Oleh karena itu, hubungan antara aktor terus berubah sehingga memodifikasi tantangan dan isu yang dipertaruhkan dalam konflik. Interaksi membuat konflik tidak stabil dan sulit diprediksi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, resolusi konflik telah gagal menciptakan perdamaian dalam perjuangan akhir-akhir ini karena cenderung untuk sekadar mengatasi konflik. Kajian ini menegaskan bahwa resolusi konflik memiliki alat yang terbatas untuk menangani konflik yang terdiri dari banyak aktor dan hubungan, tanpa pemimpin untuk mewakili kelompok-kelompok pada berbagai tingkat masyarakat dan terlibat dengan kelompok lain.

Oleh karena itu harus diakui bahwa diperlukan pendekatan baru untuk memahami konflik. Walby mengambil konsep kompleksitas, yang secara tradisional ditemukan di dalam ilmu alam seperti Biologi, Fisika, dan Kimia, dan mengkonseptualisasikannya dari sudut pandang Sosiologis untuk menganalisis globalisasi dan banyak faktor yang berinteraksi dalam fenomena ini (Walby, 2003). Walby telah dikritik karena mencoba masuk ke dalam konteks Sosiologis, sebuah teori yang berasal dari sains dimana kausalitasnya dapat diukur secara matematis dibandingkan dengan yang diamati. Namun, teori Walby yang menyoroti pentingnya mempertimbangkan situasi sosial sebagai jaringan elemen dan dengan mempertimbangkan keterkaitannya terbukti sangat berguna dalam mempelajari konflik sosial. Teori kompleksitas melihat dunia terdiri dari serangkaian hubungan sosial seperti kelas, jenis kelamin, etnisitas atau usia dan masing-masing elemen dari sistem yang terdiri dari banyak elemen interaksi yang saling berinteraksi dan saling

mempengaruhi satu sama lain. Setiap elemen dapat menjadi bagian dari lebih dari satu sistem yang memaksa semua sistem untuk berinteraksi. Oleh karena itu "gangguan ringan bisa menyebabkan perpecahan dengan hasil yang tidak dapat diprediksi" (Boulding, 1962).

Transformasi Konflik

Transformasi konflik (Lederach, 2003) adalah sebuah istilah yang telah diciptakan pada akhir 1980-an oleh John Paul Lederach. Ini menunjuk sebuah metode resolusi konflik yang berfokus pada transisi dari kekerasan ke perilaku yang tidak merusak dan membangun kembali hubungan antara musuh dalam konteks konflik etnis tertentu (Kriesberg, 2011). Transformasi konflik memang sangat sesuai dengan konflik etnis, yang merupakan konflik kompleks dan sistemik. Terlihat oleh beberapa orang sebagai metode pembangunan perdamaian “Bina Damai” tanpa kekerasan, ia bermaksud untuk berurusan dengan konflik berkepanjangan atau asimetris yang berulang kali menggantikan fase kekerasan dan perdamaian (Miall, 2004). Transformasi konflik menunjukkan bahwa konflik etnis berulang diciptakan oleh ketidakseimbangan kekuasaan dan keterputusan hubungan sosial, yang dapat diperbaiki melalui transformasi dan pembangunan kembali hubungan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menciptakan keberlanjutan damai dengan mengatasi akar penyebab kerusuhan dan dengan memberi kekuasaan kepada rakyat untuk mencapai perdamaian yang adil (Ryan, 2013).

Ryan berpendapat bahwa jika konflik hanya dihentikan oleh intervensi tanpa transformasi, kemungkinan besar kekerasan akan terulang kembali. Transformasi konflik tidak melihat konflik secara fundamental buruk karena sebenarnya mereka adalah agen perubahan dalam masyarakat namun bertujuan untuk mengubah konflik secara bertahap untuk menghindari kekerasan. Ini juga bertujuan untuk menerapkan perdamaian yang lebih dari negatif, tidak adanya kekerasan; Ini juga mencari perdamaian positif, akhir kekerasan struktural untuk perdamaian yang tahan lama (Galtung, 1996).

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif eksploratif berdasarkan studi kasus ilustratif tunggal. Ini mengadopsi perspektif epistemologis konstruktivis mengenai pengetahuan. Ketika sampai pada studi konflik, narasi pluralitas dan subjektivitas peneliti yang tak terelakkan mempengaruhi cara memperoleh pengetahuan. Naratif berubah sesuai ingatan, pengalaman masa lalu, etika, ideologi dan bahkan gender sehingga konflik diciptakan oleh interaksi sosial dan hubungan. Ini relevan dengan penelitian ini karena transformasi konflik mengasumsikan bahwa perdamaian bergantung pada perubahan hubungan. Studi tentang konflik membutuhkan banyak perspektif dan kesadaran bahwa solusi untuk beberapa mungkin menjadi masalah bagi orang lain sehingga sulitnya untuk membangun proses perdamaian yang tahan lama.

Oleh karena itu studi ini hanya dapat memberikan analisis subyektif mengenai konflik di Balinuraga dikarenakan laporan konflik telah dibangun melalui analisis wacana, media dan pandangan pribadi mengenai situasi tersebut. Apalagi penuh pengertian dari konflik di Balinuraga akan memerlukan wawancara pribadi yang menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diamati ini.

Sumber Data

Penelitian ini akan bergantung sepenuhnya pada data sekunder. Artikel berita berasal dari media cetak dan online dan semuanya telah dipublikasikan. Dua sumber media yang banyak digunakan yaitu Lampung Post dan Radar Lampung. Keduanya adalah penerbit independen dan swasta yang berada di Bandar Lampung dan mempublikasikan laporan dalam bahasa Indonesia. Misi mereka adalah untuk menyebarkan berita yang tidak memihak kepada publik. Sumber-sumber tertentu dipilih karena mereka memberi wawasan tentang situasi di Balinuraga yang berbeda dari yang dapat ditawarkan oleh media lainnya. Namun, informasi yang diberikan oleh

materi tersebut akan diperiksa secara hati-hati dengan sumber lain untuk menghindari subjektivitas yang berlebihan.

Metode Analisis

Konflik adalah sistem kompleks yang terdiri dari aktor, peristiwa, hubungan dan faktor yang mempengaruhi seperti ekonomi, geografi atau sejarah sehingga pendekatan analisis sistemik terdiri dari dua bagian; salah satunya adalah pemetaan konflik, atau analisis konflik itu sendiri, dan yang kedua menggunakan analisis ini untuk menyusun strategi proses transformasi. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan penggunaan pendekatan analisis sistem terhadap transformasi konflik. Pemikiran sistemik melihat pola pemetaan perubahan dan saling ketergantungan dan memberi penekanan khusus pada agen manusia dalam menentukannya dinamika dan perkembangan konflik (Ropers, 2008).

Metode analisis konflik penelitian ini akan dilakukan pada dua tingkat: makro dan tingkat meso. Analisis dua tingkat ini memungkinkan untuk memberikan yang lebih jelas dan lebih banyak lagi laporan komprehensif tentang konflik untuk menerapkan secara tepat pendekatan sistemik terhadap intervensi konflik. Konflik tersebut akan dianalisis pada dua tingkat yang berbeda (Paffenholz, 2004):

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Way Panji dan Kalianda

Kecamatan Way Panji sebagian besar penduduk berasal dari etnik Bali, Jawa, dan Banten tersebar di 4 (empat) desa, salah satunya adalah Desa Balinuraga (desa tempat etnik Bali bermukim). Sedangkan, Kecamatan Kalianda sebagian besar penduduk merupakan etnik Lampung yang telah tinggal sebelum etnik Bali datang ke Lampung. Etnik Lampung tinggal tersebar di semua desa-desa yang ada di Kecamatan Kalianda, salah satunya Desa Agom. Etnik lain yang tinggal di desa-desa lainnya di Kecamatan Kalianda adalah Jawa, Sunda, Banten, dan Semendo.

Penduduk di 2 (dua) kecamatan dapat dikatakan beragam berdasarkan etnik. Ini cerminan dari suatu masyarakat majemuk (*plural*). Kemajemukan suatu penduduk juga

dapat diklasifikasi ke dalam 2 (dua) konfigurasi kategori, yaitu mayoritas dominan, dan fragmentasi. Etnik Lampung merupakan etnik mayoritas dominan karena menganggap atau merasa sebagai penduduk asli dan memiliki kontrol atau kekuasaan untuk mengontrol serta jumlahnya lebih banyak dibanding etnik lainnya. Di samping itu, etnik-etnik di kedua kecamatan, hidup dan tinggal meskipun tidak semuanya, terfragmentasi. Terlihat jelas dari pemukiman etnik Lampung dan Bali yang terfragmentasi dari pemukiman etnik lainnya. Etnik Jawa, Banten juga mukim bersama etnik Jawa dan Banten lainnya, namun banyak juga etnik Jawa dan Banten lainnya yang juga mukim di perkampungan etnik Lampung. Keadaan ini tidak berlaku bagi etnik Bali. Keadaan mayoritas dominan dan permukiman yang terfragmentasi menjadi kondisi rentan terjadinya konflik sosial.

Konflik Balinuraga dan Agom

Konflik sosial yang sering disebut dengan “Konflik Balinuraga – Agom” atau Konflik Way Panji” merupakan konflik sosial yang sempat menjadi perhatian nasional bahkan juga menjadi perhatian internasional. Konflik yang terjadi di Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung bermula – dipicu – dengan adanya dugaan kejadian pelecehan seksual yang dilakukan pemuda Bali terhadap remaja perempuan etnik Lampung. Sebelum konflik bereskalasi, ada upaya dialog dan atau musyawarah yang dilakukan oleh para orang tua, tokoh pemuda, para kepala desa antara kedua pihak berkonflik untuk berdamai namun tidak berhasil. Hal ini dikarenakan adanya berbagai latar belakang masalah mendasar lainnya yang telah membuat kegeraman dan keresahan yang telah ada dalam jangka waktu cukup lama, maka terjadi penyerangan massa etnik Lampung yang berasal dari berbagai wilayah ke Desa Balinuraga.

Konflik ini akhirnya berubah menjadi konflik bernuansa etnik - antara kelompok etnik Bali dengan kelompok etnik Lampung. Isu membias tidak hanya bernuansa etnik (juga agama). Pada puncaknya, konflik ini tidak hanya melibatkan dua pihak saja namun melibatkan etnik Lampung lain dari berbagai daerah seperti Jabung, Asahan, Lampung Tengah, Metro, Lampung Utara, dan etnik Lampung dari Provinsi

Banten. Selain itu, ada beberapa etnik lain (terutama etnik Jawa dan Semendo) yang juga turut serta membantu etnik Lampung.

Konflik kekerasan Balinuraga sebenarnya bukan merupakan konflik yang berdiri sendiri, tetapi didahului oleh konflik-konflik yang terjadi sebelumnya (konflik akumulatif) dengan intensitas dan eskalasi semakin tinggi dan meluas. Adapun konflik kekerasan yang terjadi sebelumnya, yaitu mulai tahun 1982 hingga 2012 dikenal dengan konflik Marga Catur (terjadi di Desa Marga Catur, etnik Jawa dan Bali) dan konflik Napal (terjadi di Desa Dusun Napal, etnik Lampung dan Bali), serta konflik dengan etnik Semendo (etnik Semendo dan Bali).

Presentasi etnik Bali dalam pemetaan konflik dapat digambarkan sebagai *common enemy* etnik Lampung, Jawa, dan Semendo. Ada kesamaan kebutuhan (rasa aman, balas dendam, mengobati sakit hati) dan prasangka ketiga etnik terkait keberadaan etnik Bali. Kesamaan kebutuhan dan prasangka ini lah yang dapat menyatukan mereka dalam suatu *in-group*. Prasangka *in-group* terhadap *out-group* bersumber dari timbulnya kesadaran terhadap sasaran prasangka, yakni kesadaran bahwa (1) kelompok lain berbeda latar belakang kebudayaan serta mental; (2) tidak mampu beradaptasi; (3) selalu terlibat dalam tindakan negative; dan (4) dapat mengancam stabilitas sosial dan ekonomi.

Anatomi Konflik

Konflik bermula karena pelecehan seksual oleh pemuda desa Balinuraga kepada etnis Lampung.

a. Eskalasi konflik

Dialog antara kedua pihak berkonflik tidak berhasil, dan karena adanya berbagai latar belakang masalah mendasar lainnya membuat kegeraman dan keresahan yang telah ada dalam jangka waktu cukup lama, terjadi penyerangan massa etnis Lampung yang berasal dari berbagai wilayah ke desa Balinuraga

b. Hubungan antar aktor

Pada puncaknya, konflik ini tidak hanya melibatkan dua pihak saja namun melibatkan etnik Lampung lain dari berbagai daerah seperti Jabung, Asahan,

Lampung Tengah, Metro, Lampung Utara, dan etnik Lampung dari Provinsi Banten. Selain itu, ada beberapa etnik lain (terutama etnik Jawa dan Semendo) yang juga turut serta membantu orang Lampung. Hal ini terjadi karena akumulasi kekesalan etnik pendatang yang merasa pernah berseteru dengan orang Bali.

Akibat Konflik

Konflik Balinuraga – Agom merupakan gambaran konflik yang dapat dijelaskan dengan menggunakan Model Konflik Realistis - *Realistic Conflict Theory* - yang dikembangkan oleh Campbell. Konflik antar kelompok terjadi karena ancaman nyata ditambah ancaman lain yang tidak nyata yang diterima oleh setiap kelompok etnik yang terlibat dalam konflik. Setiap kelompok yang bertikai mengalami tekanan, dan tekanan mempengaruhi struktur sosial, aktivitas *in-group*, dan aktivitas individual. Akumulasi dari tekanan akan melahirkan etnosentrisme, makin kuatnya solidaritas *in-group*, yang dapat mendorong frekuensi dan kualitas dari kekerasan antar kelompok. Konsekuensi penggunaan kekerasan antar kelompok tentunya terjadi pengrusakan, penjarahan, kesakitan, bahkan kematian individu yang bertikai.

Akibat penyerangan atau konflik Balinuraga – Agom mengakibatkan sebuah gedung SMP rusak 40%; sebuah gedung SD rusak 20%; tempat ibadah berupa 1 (satu) unit Pura milik Banjar rusak parah; rumah warga berjumlah 375 rumah beserta pura; korban meninggal 9 orang dan puluhan orang Bali serta 4 orang Lampung luka-luka.

Analisis Konflik Tingkat Meso

Analisis tingkat meso terlihat lebih khusus pada kelompok-kelompok etnis elit desa, pemerintah desa, kecamatan, kabupaten yang menjadi pusat konflik. Ini bertujuan untuk menilai kebutuhan, minat dan posisi spesifik mereka. Tingkat meso memberikan wawasan yang lebih baik tentang tindakan apa yang bisa diambil di tingkat lokal untuk mengubah konflik.

Permukiman etnis Bali di Desa Balinuraga telah ada sejak transmigrasi swakarsa etnis Bali ke Lampung, namun hingga saat ini mereka masih berkumpul menjadi satu (terkesan eksklusif) dan perlakuan pemerintah kecamatan juga tidak terlalu berpihak pada etnis Bali. Penolakan etnis-etnis lain, termasuk etnis Lampung,

untuk mengakui mereka sebagai warganya sendiri telah semakin menciptakan frustrasi dan kemarahan di kalangan etnis Lampung. Meskipun, etnis Bali mendefinisikan identitasnya sebagai warga Lampung dengan etnis Bali, yang beragama Hindu dan, menurut mereka, adalah warga Lampung yang sama dengan etnis lainnya, serta wilayah yang telah mereka tempati telah cukup lama. Saat ini, hadir di seluruh Provinsi Lampung karena banyaknya jumlah orang Bali yang berpindah (transmigrasi swakarsa) dengan tujuan mengubah hidup dan menghindari bencana alam.

Bentrokan baru-baru ini di Desa Agom, memiliki penyebab yang lebih langsung: pemerkosaan dan Pembunuhan. Orang-orang Bali dianiaya dan dijarah oleh penduduk lokal. Lebih buruk lagi, gerakan anti-Bali dipimpin oleh tokoh-tokoh masyarakat di wilayah tersebut telah mendorong peristiwa konflik yang berulang-ulang. Etnis Bali yang terpinggirkan tampaknya tidak memiliki advokat, yang dapat menjelaskan kurangnya upaya untuk menemukan solusi konflik yang berkepanjangan ini.

Sementara sejumlah perdamaian telah diselenggarakan untuk menghentikan kekerasan antara etnis Bali dan etnis Lampung serta etnis lokal lainnya. Oleh karena itu, masalahnya telah mengambil dimensi nasional, meningkatkan kepedulian masyarakat nasional dan LSM hak asasi manusia. Kredibilitas daerah sangat terancam oleh masalah ini dan masyarakat nasional telah diminta untuk menegakkan tanggung jawabnya untuk melindungi karena jumlah korban, pengungsi yang cukup besar. Mereka khawatir tentang situasi kemanusiaan di Balinuraga yang dikatakan 'mengerikan' karena banyak TNI, Polri, dan LSM menyerukan tindakan segera. Para TNI, Polri melaporkan bahwa prioritasnya adalah evakuasi, mengungsikan korban, tempat mukim, logistik, dan penyediaan air minum serta kesehatan pengungsi. Pemerintah daerah bersama-sama Polri dan TNI berperan untuk mengupayakan perdamaian dan juga rehabilitasi korban serta rekonstruksi bangunan-bangunan yang rusak.

Pendekatan Sistemik terhadap Transformasi Konflik

Analisis konflik telah memberikan gambaran yang lebih jelas tentang berbagai pemangku kepentingan dari sistem konflik serta konteks di mana kekerasan berkembang. Bagian ini bertujuan untuk mengusulkan kemungkinan penerapan strategi transformasi konflik yang diberikan fitur-fitur konflik yang diartikulasikan sebelumnya.

Mengikuti Wils et al. tiga langkah untuk merancang strategi yang efektif untuk intervensi, proses transformasi yang diusulkan akan terungkap sebagai berikut: penilaian tentang apa yang harus diubah dalam sistem untuk mengusulkan solusi kreatif untuk perdamaian yang berkelanjutan, isu-isu transformasi dan perubahan struktural, evaluasi alat-alat diperlukan untuk mengimplementasikan perubahan dan mengubah aturan dan budaya, serta akhirnya saran dari sumber daya yang akan dialokasikan dan cara mereka untuk mencapai pihak-pihak konflik.

Perencanaan Strategis untuk Transformasi Konflik Sistemik

Konflik di Balinuraga dicirikan oleh keseimbangan kekuasaan yang rapuh antara dua atau lebih kelompok yang merasa terancam satu sama lain, ciri khas dari eksklusi dan eskalasi arketipe konflik. Oleh karena itu di tangan pihak ketiga, intervener, untuk menghasilkan solusi yang kreatif dan inklusif yang relevan dengan masalah ini dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam rangka untuk mengurangi konflik. Rupsinghe menyarankan penggunaan intervensi multi-track, campuran tindakan akar rumput, dan aliansi aktor masyarakat sipil.

Masalah utama dalam konflik tampaknya adalah pemerintah daerah yang abai. Dengan politik lokal yang masih memegang sejumlah besar kekuasaan atas pengambilan keputusan politik, peradilan dan militer, kelompok etnis tidak bisa merasa aman. Reformasi konstitusional yang mendalam, transparan dan jujur sangat penting untuk mengurangi politik lokal, memperkuat institusi serta aturan hukum dan menerapkan proses pengambilan keputusan bottom up untuk memastikan pengambilan keputusan yang adil dan merata di tingkat lokal. Menurut Grofman dan Stockwell,

pembagian kekuasaan institusi adalah solusinya. Ini memang akan memuaskan tuntutan otonomi yang meningkat dari kelompok-kelompok etnis.

Pihak berwenang setempat akan lebih siap untuk menangani masalah hak atas tanah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kelompok etnis. Selain itu, penguatan politik lokal menciptakan kepercayaan pada komunitas yang lebih kecil dan memberi mereka rasa pengakuan yang berpartisipasi dalam mengubah perilaku, persepsi, dan sikap. Pemerintahan yang bermasalah tidak mudah diubah karena hambatan yang ada untuk berubah. Perlawanan terjadi ketika pihak-pihak yang berselisih enggan untuk proses perubahan, karena takut akan hal yang tidak diketahui, takut kehilangan kekuasaan, keamanan atau identitas.

Ada beberapa titik masuk ke intervensi sistemik pihak ketiga mengingat bahwa reformasi harus dilakukan:

1. Titik masuk masyarakat sipil: Menciptakan jaringan organisasi akar rumput yang akan dikaitkan dan mungkin dibiayai oleh organisasi donor dapat memberikan titik masuk yang kuat dan transparan ke daerah tersebut. Karena semua tindakan akan diambil dan dilaksanakan dari tingkat lokal. Namun mekanisme harus diberlakukan agar tidak ada penyalahgunaan dari organisasi yang lebih besar. Masyarakat sipil dapat memiliki peran penting dalam mendukung berakhirnya permusuhan: itu adalah titik masuk langsung.
2. Titik masuk politik: pemilihan-pemilihan kepala desa, legislatif merupakan titik masuk potensial untuk intervensi pihak ketiga. Ini akan memberikan peluang bagi penerapan kebijakan tata kelola desa yang baik. Ini juga memberikan kesempatan untuk mereformasi lembaga dan kelembagaan desa untuk menerapkan aturan hukum yang memadai. Titik masuk politik ditulis baik dalam strategi jangka pendek maupun panjang.
3. Titik masuk ekonomi: Riefel dan Gilpin menyarankan bahwa reformasi ekonomi dapat memberikan peluang untuk transformasi dan pembangunan di desa-desa rawan konflik. Ini termasuk pembangunan kapasitas yang efektif, reformasi kebijakan yang bertujuan untuk pemberdayaan fiskal, mengurangi korupsi dan pengelolaan sumber daya yang bijaksana. Titik masuk ekonomi seharusnya hanya

digunakan di masa depan setelah perdamaian dan lembaga dan kelembagaan desa yang cukup kuat sehingga pembangunan ekonomi dapat dipertimbangkan.

Mobilisasi Agen-agen Perubahan Perdamaian

Sekarang setelah peluang untuk transformasi isu, titik masuk dan resistensi telah diidentifikasi, agen perubahan harus dimobilisasi untuk menerapkan strategi. Para agen perubahan damai dapat ditemukan di banyak tingkatan: desa, kecamatan, kabupaten, pihak-pihak berkonflik dan elit atau individu. Sering dianggap sebagai kelompok yang tidak signifikan atau tidak berpengaruh, transformasi konflik menekankan pentingnya peran pendukung mereka. Mereka dapat bertindak sebagai mitra, atau mediator dalam proses perubahan tanpa kekerasan, *peacebuilding* dan resolusi konflik. Agen-agen perubahan perdamaian, jika mereka bukan kepribadian yang berpengaruh, harus mewakili politik atau sosial tertentu.

Pembahasan Konflik Keseluruhan

Setelah menganalisis secara menyeluruh sistem konflik dan dinamika konflik serta mengusulkan strategi transformasi sistemik, tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menyoroti dan membahas empat bidang utama perubahan yang memerlukan perhatian untuk menginduksi perubahan dalam sistem dan mentransformasikan konflik menuju perdamaian. Fokus pada empat bidang adalah transformasi individu, interpersonal, struktural dan masyarakat.

1. Transformasi Individu

Transformasi konflik akan mengharuskan kedua belah pihak untuk melakukan kompromi, sasaran harus diubah melalui teknik tawar-menawar yang memperhitungkan ideologi, agama, masa lalu, mitos, dan karakteristik penting lainnya dari pihak-pihak konflik. Untuk mencapai hal ini, transformasi individu diperlukan. Dudouet menyebutkan kebutuhan untuk 'decommit', meninggalkan masa lalu di belakang dan melepaskan amarah dan ketidakpercayaan. Menurutny, ini bisa dilakukan melalui pemberdayaan dan pengakuan serta multi-level multi lintas dialog. Hal ini terutama dapat dilakukan melalui lokakarya dialog antar-

orang, di hadapan mediator netral yang disetujui oleh peserta. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tanggap, empati bersama dan pemahaman semua pihak yang terlibat.

2. Transformasi Interpersonal

Lederach menekankan pentingnya hubungan (*relationships*) dalam transformasi konflik dan mengusulkan langkah-langkah peningkatan kapasitas interpersonal dalam kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Studi ini menyarankan penggunaan komisi kebenaran dan rekonsiliasi dalam kerja sama dengan masyarakat sipil lokal. Menurut Curle, rekonsiliasi membantu transisi dari 'tidak menyenangkan' ke hubungan yang damai. Ini mendorong pengampunan dan melupakan dan menghapus hubungan dominasi dan posisi yang tidak tepat. Rekonsiliasi berpartisipasi dalam penyembuhan sosial dan psikologis sehingga memecah siklus kekerasan dan ketidakpercayaan. Komisi akan membutuhkan kehadiran perwakilan tokoh-tokoh dari semua pihak yang terlibat, yaitu pemerintah, para tokoh, kelompok etnis dan kelompok yang terpinggirkan. Namun pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa efisien mekanisme tindak lanjut harus digunakan sehingga perbaikan yang dijanjikan diberikan kepada para korban, marginalisasi para saksi dihindari, investigasi lebih lanjut tentang kejahatan yang dilakukan dan rekonsiliasi yang benar dapat terjadi.

Selain proses rekonsiliasi antar masyarakat, negosiasi yang lebih formal harus dilakukan antara pemangku kepentingan konflik untuk mengidentifikasi isu-isu utama dan solusi potensial. Ini adalah dasar dari perjanjian perdamaian di masa depan. Namun, itu adalah keterlibatan dalam proses diskusi menjadi penting, bukan hasil. Kuncinya adalah dilakukan negosiasi untuk menempatkan kesetaraan, rasa hormat, partisipasi dan saling memperkaya.

Setelah tingkat kepercayaan cukup ada, akan terjadi demobilisasi, dan rehabilitasi para korban maupun pelaku. Demobilisasi dan rehabilitasi bertumpu pada restrukturisasi hubungan antara kekuatan yang berlawanan dan itu harus menjadi proses yang disepakati bersama daripada diberlakukan secara sepihak.

Keberhasilan demobilisasi dan rehabilitasi dapat dicapai melalui penciptaan peluang kerja tambahan dan terpenuhinya makanan, air, pakaian, dan kebutuhan dasar yang bisa meningkatkan keamanan manusia di wilayah konflik. Mereka harus membebaskan diri dari rasa takut terhadap yang lain. Sementara studi ini enggan menyarankan kehadiran aktor eksternal di lapangan, demobilisasi dan rehabilitasi dapat difasilitasi oleh agen-agen pembangunan perdamaian. Perubahan harus dilakukan di tingkat komunitas dan pemerintah daerah yang terendah. Masyarakat luar seharusnya hanya bertindak sebagai penggerak perubahan dan fasilitator.

3. Transformasi Masyarakat

Kebutuhan akan transformasi budaya sering diremehkan. Namun demikian penting dalam konflik etnis untuk menciptakan rasa atau menguatkan identitas. Studi ini menyarankan penciptaan program pendidikan yang dirancang untuk mengajarkan anak-anak tentang bangsa mereka dan kesetaraan antar etnis. Kebijakan bahasa juga harus diterapkan untuk memastikan rasa hormat dari semua dialek. Simbolis langkah-langkah seperti pengakuan perbedaan antara kelompok etnis dan penghormatan dari perbedaan tersebut menciptakan perubahan signifikan dalam sikap.

Pengembangan kegiatan budaya yang mengelompokkan berbagai kelompok etnis juga diperlukan untuk menciptakan rasa keintiman di antara kelompok-kelompok. Keterlibatan dalam kegiatan semacam itu dapat membantu peserta memahami satu sama lain di luar etnis mereka. Ini Kegiatan bisa berupa musik, teater, olahraga, permainan untuk anak-anak melukis, kelas, klub buku dan asosiasi budaya lainnya. Misalnya, menyiapkan turnamen sepak bola antara umat Hindu dan Muslim dengan tim campuran dapat membantu kedua kelompok melihat yang lainnya dalam situasi yang berbeda, sebagai aktor yang berbeda, sebagai rekan satu tim atau lawan, bukan sebagai musuh.

KESIMPULAN

Temuan-temuan menunjukkan bahwa transformasi konflik dapat membawa suatu wilayah, kelompok menjadi maju, menuju demokrasi, pembangunan dan perdamaian. Ini membutuhkan implementasi yang hati-hati dan pemantauan sistematis serta komitmen dari semua pemangku kepentingan yang berkonflik dan bantuan eksternal potensial. Transformasi konflik, termasuk rekonsiliasi, perubahan tata kelola, transformasi sikap dan perilaku serta pembangunan kepercayaan adalah proses untuk mengungkap dalam waktu yang cukup lama, bahkan puluhan tahun dan orang seharusnya tidak mengharapkan hasil segera.

Memang ada sejumlah kekurangan dalam penerapan transformasi konflik. Salah satu poin utama pertikaian adalah keinginan dan kebutuhan untuk melibatkan komunitas yang lebih besar melalui ikatan etnis dan OMS. Memang ada keengganan untuk ikut serta dalam urusan internal mereka, namun kehadiran mediator, pengamat dan fasilitator, pelatih yang netral nampaknya penting untuk membangun transformasi konflik di Balinuraga. Banyaknya narasi yang dipegang oleh berbagai pihak yang bertikai dan variasi masalah yang saling bertentangan di antara sistem yang berbeda menyulitkan untuk membayangkan langkah-langkah yang tepat untuk diambil tanpa terlihat mendukung salah satu aktor konflik. Oleh karena itu ada kontradiksi antara pendekatan *bottom up* yang disarankan oleh Lederach dan perlunya intervensi eksternal.

Teori kompleksitas telah disorot ketidakpastian hasil karena perubahan tingkat mikro di dalam sistem menginduksi perubahan tingkat makro. Selain itu, transformasi konflik membutuhkan komitmen jangka panjang dari berbagai pihak yang mungkin tidak dapat mendedikasikan sumber daya yang memadai, dana, waktu, mekanisme pemantauan, ruang negosiasi dan dukungan yang diperlukan untuk penyelesaian konflik. Selain itu, mengingat jumlah aktor yang terlibat dalam transformasi, komunikasi, fleksibilitas dan saling pengertian adalah hal yang penting. Ini membutuhkan adaptasi budaya. Akhirnya, konsekuensi, yang dimaksudkan atau tidak diinginkan, bermanfaat atau berbahaya, transformasi konflik sistemik hanya akan dapat

diamati selama beberapa dekade berikutnya sehingga sulit untuk mengevaluasi keabsahan pendekatan Lederach. Pemantauan situasi secara konstan serta penelitian lebih lanjut sebagai situasi perlu dilakukan. Studi ini hanya menawarkan wawasan pengantar tentang potensi transformasi konflik di Balinuraga.

DAFTAR PUSTAKA

- Boulding. 1962. *Conflict and Defense: a general theory*. New York: Harper and Brothers. Page: 23, 24.
- Collier. 2003. *Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy*. Oxford: Oxford University Press. Page: 83.
- Diamond and McDonald. 1996. *Multi-Track Diplomacy: a Systems Approach to Peace*. Washington D.C.: Kumarian Press. Page: 3.
- Dudouet, Veronique. 2006. 'Transitions from Violence to Peace: Revisiting Analysis and Intervention in Conflict Transformation'. *Berghof Handbook for Conflict Transformation*. Page: 24.
- Galtung, J. 1996. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. SAGE Publications. Page: 51, 68.
- Hendrick, Diane. 2009. 'Complexity Theory and Conflict Transformation'. *Working Paper 17* Centre for Conflict Resolution, University of Bradford. Page: 26.
- Hollis and Smith. 1990. *Explaining and understanding international relations*. Oxford: Clarendon Press.
- Kriesberg. 2011. "The State of the Art in Conflict Transformation". *Berghof Handbook for Conflict Transformation*. Page: 59.
- Lapid. 1989. "The Third Debate: On the Prospects of International Theory in a Post-Positivist Era". *International Studies Quarterly* 33 (3): 240.
- Lederach, J.P. 1995. *Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Cultures*. Syracuse University Press. Page: 5, 200.
- Lederach, J.P. 1997. *Building peace: sustainable reconciliation in divided societies*. United States Institute of Peace Press (USIP Press). Page: 31.

- Lederach. 2003. *The Little Book of Conflict Transformation*. Intercourse, PA: Good Books. Page: 3, 7, 11.
- Miall. 2004. "Conflict Transformation: A Multi-Dimensional Task". Page: 3.
- Mu'id, Onaje. 2003. Shortcomings of the Conflict Resolution Field Retrieved from: <http://www.beyondintractability.org/audioplay/muid-o-4-field1>
- Paffenholz, Thania. 2004. 'Designing Transformation and Intervention Processes'. *Berghof Handbook for Conflict Transformation*. Page: 4.
- Ramsbotham, et al. 2005. *Contemporary Conflict Resolution. The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts*. London: Polity. Page: 100.
- Ropers, Norbert. 2008. 'Systemic Conflict Transformation: Reflections on the Conflict and Peace Process in Sri Lanka'. *Berghof Handbook for Conflict Transformation*. Page: 2.
- Ryan. 2013. *The Transformation of Violent Intercommunal Conflict*. Ashgate Publishing, Limited. Page: 8.
- United Nations. 2007. "Peacebuilding and the United Nations" Retrieved from: <http://www.un.org/en/peacebuilding/pbso/pbun.shtml>.
- United Nations. 2013. "Demographic and social statistics: Ethnocultural characteristics" Retrieved from: <http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/popchar/popcharmethods.htm>
- Walby, Sylvia. 2003. 'Complexity theory, Globalisation and Diversity'. *Paper presented to conference of the British Sociological Association, University of Leeds*. Page: 6.
- Wehr. 1979. *Conflict regulation*. Boulder, Colorado: Westview Press.
- Wils, Oliver, Ulrike Hopp, Norbert Ropers, Luxshi Vimalarajah and Wolfram Zunzer. 2006. 'The Systemic Approach to Conflict Transformation Concept and Fields of Application'. *Berlin: Berghof Foundation for Peace Support*. Page: 4, 5, 52.